Beberapa Permasalahan yang Dihadapi Pelaut Indonesia dan Urgensi Perlindungan Hukumnya Menghadapi Dampak Globalisasi dan Perdagangan Bebas

By M. Syamsudin

WORD COUNT 2610

TIME SUBMITTED 28-JUL-2016 11:48AM

PAPER ID 24264369

B-28
Hal. I-II.1-1-1-16

KONFERENSI NASIONAL
HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN

SEMARANG, 31 OKTOBER 2009

PENGESAHAN
Telah diperiksa kebenarannya dan
Sesuai dengan aslinya
Yogyakarta, _____

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
Ketua Program Studi

Karimatul Ummah, SH., M.Hum
NIP 924100104

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
JL. PAWIYATAN LUHUR IV/1 BENDAN DUWUR SEMARANG 50234

ISBN : 978-6028011-06-8

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Makalah Konferensi :

A. Menyoal Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Keadilan Lingkungan untuk Hutan Indonesia
   (Benny D. Setianto)..... I.1.1

2. Ironi Penegakan HAM di Indonesia Suatu Kajian terhadap Kasus Trisakti dan Semanggi
   (Bernardo Danu Jaya, Johan Setiawan, Ariehta Eleison, Litinus Agabal) I.2.1

3. Hak Sosial dalam Pelayanan Kesehatan Vs Hak Individu dalam Pelayanan Kesehatan (Tinjauan tentang Dilema antara Perlindungan Masyarakat terhadap Penyakit Menular dengan Hak atas Rahasia Kedokteran
   (Y.Endang Wahyati) I.3.1

4. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM; Kendala dan Solusinya
   (Johanes Sardadi) I.4.1

5. Beberapa Prinsip dan Pengaturan Pertanggungjawaban Komando dalam Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia
   (Marcella Elwina S) I.5.1

6. Analisis Pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam Putusan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum.
   (Nidyana Dwi Deviani)..... I.6.1

7. Kewajiban Negara Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) di Indonesia
   (Rahayu)..... I.7.1

8. Politik Hukum Nasional dalam Membangun Sistem Hukum Berbasis Perlindungan HAM di Era Global
   (Shinta Dewi Rismawati)..... I.8.1

9. Demokratisasi dalam Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah
   (Sulardi) I.9.1

10. Dialektika Antara Hukum Dan Kekuasaan Dalam Kehidupan Politik.
    (Prof. Dr. A. Gunawan Setiardja)..... I.10.1

11. Beberapa Permasalahan yang Dihadapi Pelaut Indonesia dan Urgensi Perlindungan Hukumnya Menghadapi Dampak Globalisasi dan Perdagangan Bebas
(M. Syamsudin)..... I.11.1

12. Pendataan dan Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Pemukim Keturunan Asing (Tiong Hoa) yang Tidak Berdokumen Sebagai Bentuk Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2006
(Venatius Hadiyono)..... I.12.1

13. Relevansi Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
(Woro Winandi)..... I.13.1

14. Formulasi Kejahatan Perang dalam Kebijakan Legislasi Indonesia, Suatu Kajian terhadap Implementasi Hukum Internasional dan Pembaharuan Hukum Nasional
(Y. Trihoni ND)..... I.14.1

15. Perlindungan Hukum terhadap Korban Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam perspektif HAM
(Yeni Widowati) I.15.1

16. Pemanasan Global dan Etika Lingkungan
(B. Resti Nurhayati) I.16.1

17. Penegakan HAM di Aceha Semasa Daerah Operasi Militer dan Pasca Daerah Operasi Militer
(Yohanes Gideon, Georgius Tjitra, Yeremia Arifianto)..... I.17.1

18. Strategi Penataan Ruang Tepi Sungai di Tengah Kota (Kasus Sungai Bringin Semarang
(Yovita Indrayati)..... I.18.1

19. Hukum, Kekuasaan dan Moral
(P. Soerjowinoto)..... I.19.1

II. Kejahatan Ekonomi dan Korupsi

1. Menguak Judicial Corruption Dalam Krisis
(C. Maya Indah S)..... II.1.1

2. Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana dalam Bentuk Sanksi bagi Korporasi dalam Perundang-undangan Pidana Indonesia
(Uning Pratimaratri)..... II.2.1

3. Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi Di Indonesia, dan Kebutuhan Reorientasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Doktrin Hukum Yang Bermuatan Nilai-Nilai Pancasila
(St. Mahendra Soni Indriyo)..... II.3.1

4. Kemampuan Yuridis (Legal Capacity) UU Perbankan Mengatasi Kejahatan Korporasi di Bidang Perbankan (Yakub Adi Krisanto) II.4.1

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal : Keberpihakan pada Perekonomian Liberal ataukah pada Perekonomian Kerakyatan (Y. Budi Sarwo) II.5.1

6. Audit BPK atas APBD & Good Public Governance (GPG) sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Yakub Adi Krisanto) II.6.1

7. Menyoal Prosedur Pencalonan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Studi Kasus : Syamsul Bahri (Yuliana, David Pasha Ashadha, Agustinus Bondan A.D. , dan Yustina Ayu Ch.R.) II.7.1

8. Korupsi di Indonesia (Citra Ayu, Lita Foresti, Jean Evelyn, Elen Kavarina) II.8.1

9. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal (Trisno Raharjo) II.9.1

10. Mempertegas Peran Kaum Intelektual dalam Mengawal Kebijakan yang Partisipatif Guna Meredam Korupsi (Studi Kasus Pengawalan Atas Pembuatan Kebijakan tentang Tarif Air di Salatiga (Geritz Febrianto Rindang Bataragoa) II.10.1

III. Gender dalam Hukum, Politik, dan Kekuasaan

1. Hukum, HAM, Wanita : Mengangkat Suara yang Terbungkam dalam Hukum Polifonik (Donny Danardono) III.1.1

2. Fungsionalisasi UU No. 23 Tahun 2004 dalam Penanggulangan Tindak Pidana "Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga", Studi Kasus di Wilayah Hukum PN Yogyakarta (Paulinus Soge) III.2.1

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan tentang Permohonan Ijin Poligami (Rika Saraswati dan V.Hadiyono) III.3.1

4. Kekerasan dan Perdagangan Perempuan (Edo Tjiptadi Pandi) III.4.1

BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PELAUT INDONESIA DAN URGENSI PERLINDUNGAN HUKUMNYA MENGHADAPI DAMPAK GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN BEBAS

M. Syamsudin*

ABSTRAK

Di era globalisasi seperti sekarang ini, sektor maritim memainkan peranan yang sangat penting dan strategis dalam berbagai macam aktivitas, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta aktivitas yang berkaitan dengan hubungan antar pulau dan antar negara, khususnya dalam bidang perdagangan nasional maupun internasional. Dampak dari globalisasi dan perdagangan bebas telah membawa perubahan besar bagi sektor maritim Indonesia, terutama di bidang teknologi industri maritim dan keberadaan SDM pelaut Indonesia. Menghadapai globalisasi dan perdagangan bebas pelaut Indonesia terancam akan tersingkir dari pelaut asing. Hal ini disebabkan karena kualitas SDM yang rendah dalam hal etos kerja, penguasaan bahasa asing, dan kurangnya disiplin kerja. Isu-isu yang dihadapi pelaut Indonesia di mata masyarakat internasional juga menunjukkan hal-hal yang negatif seperti adanya Isu *Black List*, *High-Risk Area*, dan Penerapan *Seafarers Identity Document*. Isu-isu ini menyulitkan posisi pelaut Indonesia di kancah internasional. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan untuk melindungi secara hukum pelaut Indonesia. Hal ini didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang terkait dengan peluang ketersediaan lapangan kerja di kapal, sebagai sumber devisa negara, pekerjaan pelaut yang penuh risiko, dan kebijakan penerapan asas cabotage secara utuh dalam posisi Indonesia sebagai negara maritim.

Kata-Kata Kunci : Pelaut Indonesia, Perlindungan Hukum, Globalisasi, Perdagangan Bebas

Isu-isu Global di Bidang Kelautan

Negara Indonesia adalah negara maritim. Hal ini ditunjukkan dengan luas wilayah Indonesia sekitar 7,7 juta kilometer persegi, terdiri atas 75 persen teritorial laut (5,8 juta km^2) dan 25 persen teritorial daratan (1,9 juta km^2). Luas teritorial laut tersebut terdiri atas 2,8 juta km^2 perairan nusantara (perairan kepulauan) dan 0,3 juta km^2 laut territorial, serta 2,7 juta km^2 zona ekonomi eksklusif (ZEE). Jumlah pulau besar dan kecil mencapai kurang lebih 17.548 buah. Potensi besar ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan teritorial laut terluas di dunia dan keseluruhan garis pantai sepanjang 80.791 km atau 50.494 mil.[1]

---

* M. Syamsudin, Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di UNDIP Semarang. E-mail : m.syamsudin@fh.uii.ac.id.

[1] Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan RI, 2004. *"Studi Penerapan Asas Cabotage Dalam Pelayaran Nasional." Laporan Akhir Penelitian*. Jakarta. Hlm.1

Di era globalisasi seperti sekarang ini, sektor maritim memainkan peranan yang sangat penting dan strategis dalam berbagai macam aktivitas, baik politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan serta aktivitas yang berkaitan dengan hubungan antar pulau dan antar negara, khususnya dalam bidang perdagangan nasional maupun internasional. Pertumbuhan volume perdagangan internasional dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat proses globalisasi telah menuntut perlunya pengembangan sektor kemaritiman agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain.[2]

Sebagai dampak dari globalisasi dan perdagangan dunia (bebas) telah membawa perubahan besar bagi sektor maritim Indonesia. Dampak tersebut mengakibatkan pula perkembangan yang pesat di bidang teknologi industri maritim. Keadaan tersebut membawa kecenderungan dalam hal penggunaan sarana transportasi, jenis kemasan dan kapasitas angkut yang semakin besar. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaut dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang semakin besar. Dengan demikian diperlukan tenaga profesional yang mampu melaksanakan fungsi dan jenis pekerjaan yang melebihi kondisi di era sebelumnya.[3]

Beberapa di era globalisasi permasalahan dan isu-isu strategis yang diperkirakan akan mempengaruhi aktivitas pelaut Indonesia mencakup antara lain :

1. Persaingan global

   Globalisasi telah membuat batas antar negara semakin kabur. Perlindungan terhadap produk dalam negeri melalui proses monopoli kini semakin ditentang oleh dunia internasional. Perjanjian perdagangan bebas seperti *Asean Free Trade Area* (AFTA), kesepakatan pasar bebas dunia melalui *General Agreemenet on Tariffs and Trade* (GATT) menentang proteksi yang diberlakukan oleh suatu negara atas intervensi pasar oleh negara lain. Setelah diberlakukannya perjanjian tersebut maka suatu unit pemerintahan di suatu negara akan mendapat tekanan yang semakin keras dari negara lain.

2. Lingkungan sosial

---

[2] Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan RI, 2005. *"Studi Kebutuhan SDM Transportasi Laut". Laporan Akhir Penelitian*. Jakarta. Hlm.1

[3] *Ibid*. Hlm.2.

Perubahan masyarakat akibat globalisasi telah menyebabkan karyawan / pegawai suatu unit pemerintahan/perusahaan menuntut perlakuan yang lebih baik. Hak-hak asasi manusia yang sebelumnya kurang diperhatikan oleh pihak organisasi kini semakin dituntut, (karyawan golongan paling rendah, penghasilannya seringkali berada di bawah upah minimum regional). Demikian pula dengan kesadaran masyarakat akan pelayanan pada masyarakat telah membuat organisasi harus lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan.

3. Lingkungan politik

Kondisi politik suatu negara sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis. Suatu negara yang situasi politiknya agak kacau menyebabkan para investor asing takut menanamkan modalnya. Kekacauan politik yang menimbulkan kerusuhan sosial akan mematikan usaha bisnis. Pengalaman kerusuhan politik di Indonesia telah menyebabkan banyak pemodal melarikan modalnya mereka ke luar negeri. Selain itu, perusakan pabrik dan alat-alat kerja telah menyebabkan banyak pabrik tutup.

4. Perubahan undang-undang

Banyak sekali peraturan-peraturan baru yang muncul dalam berbagai aspek operasi organisasi. Misalnya kehadiran UU No.25 tahun 1998 tentang Serikat Pekerja menyebabkan organisasi semakin sulit untuk mengelola karyawan. Kalau semula organisasi perusahaan hanya memiliki satu organisasi karyawan (SPSI), kini karyawan memiliki peluang untuk bergabung pada banyak serikat pekerja seperti itu, atau mungkin membuat organisasi baru.

5. Lingkungan teknologi

Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, telah merubah secara mendasar cara pengelolaan organisasi. Kehadiran komputer dengan tingkat kecanggihan yang semakin meningkat menyebabkan semakin banyak pekerjaan diganti oleh komputer. Selain itu, kegiatan organisasi semakin diwarnai oleh persaingan kecepatan waktu (*real-time*), Penggunaan internet, web-site, *lokal area network* (LAN) semakin marak dalam dunia organisasi. Organisasi harus

berpacu untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kalau tidak, bisa dipastikan akan ketinggalan.[4]

Menurut Poernomo Soedewo[5], di tengah kompetisi ketat dengan perusahaan pelayaran dan ekspedisi asing, pengusaha bidang jasa pelayaran dan ekspedisi laut pada umumnya menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama menghadapi kemungkinan maraknya usaha jasa forwader dan ekspedisi asing setelah datangnya era perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara (AFTA). Dari segi SDM sektor usaha ini masih memprihatinkan.

Menurut Arifin Hamzah[6], pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk meningkatkan SDM jasa pelayaran dan ekspedisi laut. Kompetitor yang patut diwaspadai menjelang datangnya AFTA adalah perusahaan pelayaran dan ekspedisi dari Singapura. Pasalnya, selama ini Singapura telah membuktikan diri sebagai negara yang dapat berkembang sebagai pelabuhan transit bagi jasa pelayaran dan ekspedisi laut. Dari semua negara, Singapura adalah negara yang perlu diwaspai. Kalau negara lain tidak begitu masalah. Tetapi, jangan karena ketakutan itu justru kita tidak berbuat apa pun. Kita harus melawan mereka dengan strategi training khusus dan perang pelayanan.

Menurut Rudhy Wisaksono[7], dalam era perdagangan bebas kualitas pelayanan menjadi hal utama yang mendasari konsumen untuk memilih menggunakan jasa pelayaran dan ekspedisi asing atau lokal. Namun sayangnya, pengusaha jasa lokal belum begitu mengutamakan pelayanan untuk memuaskan konsumen. Padahal, pelayanan seputar ekspor-impor itu justru memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan pemasukan dari jasa ekspedisi itu sendiri.

Untuk mengatasi persaingan yang semakin ketat, maka pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan pembinaan disiplin, dan kualitas, khususnya bagi para pelaut. Selain itu pemerintah dan instansi lainnya termasuk Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) perlu segera merumuskan *law of seamen* seperti di Filipina. Untuk menunjang kelancaran lalu lintas kapal di laut, maka diperlukan adanya awak kapal yang

---

[4] Djamaludin Ancok, 2004. *Psikologi Terapan*. Yogyakarta : Darussalam offset. Hlm.20
[5] Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gabungan Forwader dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Jatim. Dalam *Kompas* 19 Agustus 2002.
[6] Direktur PT Bandar Kusuma Jaya, Dalam *Kompas* 19 Agustus 2002.

berkeahlian, berkemampuan dan, terampil. Dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan cakap untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal, tata susunan kapal dan daerah pelayaran. Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan institusi-institusi pendidikan kepelautan yang kompeten untuk menciptakan pelaut Indonesia yang profesional, yaitu cakap dan terampil, berwatak serta memiliki sikap mandiri, serta diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayaran nasional atau asing.

Menghadapai era global ke depan, pembangunan di sektor kelautan perlu diupayakan agar dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif, handal, dan berkualitas melalui serangkaian kebijaksanaan dan program yang dilakukan secara menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan termasuk di dalamnya kebijaksanaan mengenai pengembangan SDM yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dikaji kebutuhan-kebutuhan SDM pelaut Indonesia dalam rangka mengantisipasi perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja dalam dan luar negeri khususnya bagi para pelaut Indonesia.

Perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi (*Information Technology*) juga harus mendapat porsi pendidikan dan perhatian yang besar dalam rangka pengembangan SDM pelaut tersebut, sehingga tenaga-tenaga yang berprofesi di bidang tersebut memiliki penguasaan teknologi informasi, berwawasan global, kosmopolitan yang pada akhirnya akan memberikan kinerja yang baik dan dapat bersaing di dunia internasional.

Berbagai Permasalahan yang Dihadapi Pelaut Indonesia

Pada masa global ini pelaut Indonesia banyak dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan. Kemampuan yang dimiliki tenaga pelaut Indonesia untuk menembus pasar global terancam bakal tersingkir. Hal ini disebabkan karena etos kerja pelaut Indonesia di luar negeri dinilai telah menurun. Padahal, sebelumnya hampir semua kapal asing mempekerjakan pelaut dari Indonesia. Pelaut Indonesia

[7] Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Indonesia National Shipowners Association (INSA) Surabaya.

dikenal memiliki etos kerja yang tinggi, taat perintah, penyabar dan pekerja keras. Tetapi penilaian tersebut, kini telah berubah karena berbagai tindakan tidak disiplin, di antaranya sering berbuat onar dan tidak ada penegakan hukum dari pemerintah maupun oleh asosiasi pelaut di Indonesia. [8]

Di samping tidak disiplin dalam bekerja, kualitas pelaut Indonesia saat ini juga dianggap menurun, terbukti ketika *Hanjin Container Lines* perusahaan pelayaran terbesar di Korea Selatan membutuhkan 90 orang pelaut, setelah dilakukan tes, hanya 45 orang yang mampu mencapai nilai 70 dan dianggap layak untuk mengisi lowongan yang tersedia, sedangkan yang lainnya tidak mampu mencapai skor yang lebih tinggi, penyebabnya adalah kebanyakan pelaut Indonesia tidak menguasai pengetahuan maritim, terutama dalam penguasaan Bahasa Inggris. Banyak pelaut Indonesia yang gagal tes untuk bekerja di kapal asing karena lemahnya penguasaan bahasa asing, rendahnya tingkat disiplin dan faktor keluarga. Ini juga sebagai indikator masih lemahnya pendidikan pelaut di Indonesia jika diukur dari terserapnya pelaut Indonesia di pasar luar negeri /internasional.[9]

Di samping rendahnya kualitas, pelaut Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini harus bersaing dengan pelaut Filipina yang gencar mengekspor pelaut-pelautnya yang lebih berkualitas dan dapat berkomunikasi dengan mudah karena menguasai bahasa Inggris. Di samping itu mereka telah memiliki *The Law of Seamen* yang dikeluarkan oleh *Philippine Overseas Employment Agency* yang antara lain memuat tentang tata tertib bekerja sebagai pelaut, sehingga para pelaut yang terbukti berbuat onar akan dicabut ijin kerjanya.[10]

Kualitas pendidikan pelaut di Indonesia juga masih menunjukkan banyak kelemahan, meskipun pemerintah pernah mendapatkan bantuan dari luar negeri untuk membeli peralatan sekitar US$520 juta. Jika dibandingkan dengan Pilipina, pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri sangat ketinggalan. Pada tahun 2004, pelaut Indonesia hanya kurang lebih 20.000 (duapuluh ribu) orang sedangkan Pilipina sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) orang (Maritim, 2004). Pada tahun 1994 jumlahnya sekitar 15.000 orang, di mana sekitar 10.179 orang bekerja di luar PKL

Dalam *Kompas* 19 Agustus 2002.
[8] Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan RI, 2005. *Op.Cit.* Hlm.76.
[9] *Op.Cit.*
[10] *Op.Cit.*

Beberapa Permasalahan yang Dihadapi Pelaut Indonesia dan Urgensi Perlindungan Hukumnya Menghadapi Dampak Globalisasi dan Perdagangan Bebas

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	ancok.com Internet	206 words — 8%
2	www.kompas.com Internet	179 words — 7%
3	www.ri.go.id Internet	67 words — 3%

EXCLUDE QUOTES	OFF	EXCLUDE MATCHES	< 2%
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF		

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uii.ac.id; E-mail: rektorat@uii.ac.id

Berita Acara Hasil Pengecekan Keaslian Karya Ilmiah Atas Nama Dr. M Syamsudin, S.H., M.H
Untuk kenaikan Jabatan Dari Lektor (300 AK) ke Lektor Kepala (700 AK)

Pada tanggal 24 Juli 2017 telah dilakukan pengecekan *Originality* atau *Similarity* terhadap karya Ilmiah Dosen Tetap Universitas Islam Indonesia:

Nama : Dr. M Syamsudin, S.H., M.H

NIDN/NIK : 0504096901/954100104

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

NO	KARYA	REPORT ORIGINALITY	KETERANGAN
1	Jurnal Hukum, Vol. XVII, No.2, Hal. 156-171, Juni 2008 dengan judul "Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Periklanan Atas Produk Iklan Yang Melanggar Etika Periklanan (Kajian Kritis UU Perlindungan Konsumen) ISSN: 1412-2723, Terakreditasi No.26/DIKTI/KEP/2005	7%	
2	Jurnal Hukum FH Unissula Vol.XVIII, No.2 Hal. 282-314, September 2008 dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen Penumpang Kapal Laut (Studi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya), ISSN:1412-2723 Terakreditasi no : No.26/DIKTI/KEP/2005	0%	
3	Jurnal Media Hukum Vol.15, No.2, Hal. 187-207, Desember 2008 dengan judul "Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi," ISSN:0854-8919, Terakreditasi no : No.43/DIKTI/Kep/2008	0%	
4	Jurnal Hukum & Dinamika Masyarakat, Vol.4, No.2, Hal.183-193, April 2009 dengan judul "Model Pengembangan Hukum Untuk Proyeksi Perubahan Masyarakat Indonesia Agraris Ke Industri Modern, ISSN:0854 2031,Terakreditasi no : SK. Dirjen Dikti No. 55A/DIKTI/KEP/2006	0%	
5	Jurnal Hukum Vol.17, No.3, Hal. 406-429, Juli 2010 dengan judul "Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan, ISSN: 0854-8498 Terakreditasi no : No.65A/DIKTI/KEP/2008	0%	
6	Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No.3, Hal. 498-519, Oktober 2010 dengan judul "Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan : Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum, ISSN:0852-100X, Terakreditasi no : Nomor : 51/DIKTI/Kep/2010	6%	
7	Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1 Hal. 10 - 19, Januari 2011 dengan judul "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif, ISSN:1410-0797 Terakreditasi no : Nomor 51/DIKTI/Kep/201	0%	

8	Jurnal Hukum, Vol. 18, Edisi Khusus, Hal 127-145, Oktober 2011 dengan judul "Rekonstruksi Perilaku Etika Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif, " ISSN:0854-8498 Terakreditasi no : No. 65A/DIKTI/KEP/2008	2%	
9	Jurnal Yudisial Vol. 7 No 1 April 2014, April 2014 dengan judul "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK, " ISSN:1978-6506, Terakreditasi no : LIPI No. 507/Akred/P2MI-LIPI/10/2012	0%	
10	Jurnal Media Hukum: Vol.21, No.1, 2014 dengan judul: Urgensi Pembaharuan Commercial Code di Bidang Pelayaran Guna Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Perbandingan di Pelabuhan Portklang Malaysia), ISSN: 0854-8919 Terakreditasi Dikti no: 81/DIKTI/Kep/2011	0%	
11	Book Chapter: dengan judul "Memahami Pemikiran Mohammad Koesnoe tentang Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia (Salah satu penulis dalam buku Mohammad Koesnoe Dalam Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia), Penerbit : Epistema Institute, Hal. 177-206, ISBN:978-602-19461-7-6	0%	
12	Jurnal Internasional Bereputasi (Impact Factor): EJEFAS European Journal of Economics, Finance & Administrative Sciences, Issue 55, Page 97-105, Desember 2012 dengan judul "Understanding Corruption from Behavioral Perspective: A Case Study of Yogyakarta Special Province," ISSN:1450-2275	0%	
13	Jurnal Internasional Bereputasi (Impact Factor): International Journal of Social Science and Humanity, Vol.3, No.2, Hal.156-159, Maret 2013 dengan judul "The Importance of Progressive Interpretation for Judge in Handling Corruption Cases in Indonesia, ISSN:2010-3646	0%	
14	Jurnal Internasional Bereputasi: Valley International Journals Volume 1, Issue1-3, April-June 2014, April 2014 dengan judul " Understanding The Typology of Judge's Behaviour in Handling Corruption Cases in Indonesia," ISSN:2349-2031	0%	
15	Jurnal Internasional Bereputasi: International Journal of Business and Management Study Volume 1, Issue 2, May 2014, Mei 2014 dengan judul "The Budget Misallocation Mechanism in Indonesia's Bureaucracy, " ISSN:2372-3955	2%	
16	Jurnal Internasional: International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol.3 Issue 11, Nopember 2014 dengan judul "Understanding the Meaning of Justice in the Judge's Verdict for Private Cases in Indonesia," ISSN:2319-7714	0%	
17	Jurnal Ilmiah Internasional: International Journal of Humanities and Social Science Invention Vol. 4, Issue: 9, September 2015, ISSN: 2319-7714, berjudul: Discovering the Meaning of Justice in Judges' Verdicts on Narcotics Crimes in Indonesia	3%	
18	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi: Jurnal Hukum Vol. 15, No.3, Hal.338-351, Juli 2008 dengan judul "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara, ISSN:0854-8498	4%	

19	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi: Jurnal Yudisial, Vol - V/No-01/April/2012, Hal. 38-53, April 2012 dengan judul "Keadilan Substantif yang Terabaikan Dalam Sengketa Sita Jaminan Kajian Putusan Nomor 42/PDT/2011/PT.Y," ISSN:1978-6506	0%	
20	Proseding: The4th International Graduate Studens Conference on Indonesia Theme Indigenous Communities and "The , Oktober 2012 dengan judul "Ngindung & Magersari : The Harmonization of Customary Law and State Law Dealing with Land Ownership and its Shifting Meaning in Jogjakarta," ISBN:978-602-8683-26-5	0%	
21	Proseding: Asean Conference Educating Asean Societies for Integrity The Role of Educators & Students in Buildin, April 2013 dengan judul "Understanding The Typology of Judge's Behaviour in Handling Corruption Cases	0%	
22	Proseding pada Konferensi Nasional Hukum, Politik dan Kekuasaan, Oktober 2009 dengan judul "Beberapa Permasalahan yang Dihadapi Pelaut Indonesia dan Urgensi Perlindungan Hukumnya Menghadapi Dampak Globalisasi dan Perdagangan Bebas, ISBN:978-6028011-06-8;	18%	
23	Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Desember 2011 dengan judul "Aspek Yuridis Pembangunan Peron Tinggi di Stasiun Kereta Api sebagai Sarana Perlindungan Hukum Konsumen, ISSN:2089-3590	3%	
24	Prosiding: Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Madani dan Lestari, DPPM UII, Desember 2011 dengan judul "Urgensi Standarisasi Layanan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Penumpang Kapal Kelas Ekonomi dengan Waktu Pelayaran di atas 8 jam," ISBN:978-602-95472-1-4	0%	
25	Prosiding Seminar Nasional Hukum Islam FH UNDIP, September 2012 dengan Judul "Ilmu Hukum Profetik : Gagasan Awal dan Kemungkinan Pengembangannya," ISBN:978-602-8259-42-2	0%	
26	Makalah Seminar Internasional Non Prossiding: Berjudul "Exploring Indonesian Legal Structure To Reduce Corruption Do Judge's Verdicts Really Fight Against Corruption?, Presented on the Corruption Seminar, held by Indonesian Islamic Society of South Australia (MIIAS) , pada Desember 2008 .	0%	
27	Koran pada Examinasi Edisi 1 Tahun 2011, Hal. 9, Nopember 2011 dengan judul "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Adat,	2%	
28	Editing/Sunting Buku Ilmiah: Menghasilkan Karya Ilmiah berupa Editing pada Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Desember 2013 dengan judul "Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern), ISBN:978-602-1123-01-0	8%	
29	Jurnal Nasional Terakreditasi: Hasanuddin Law Review, Vol.3, No.1, April 2017, berjudul: An Effective Supervision Model of a Standard Clause for Consumer Protection in Business Transactions, ISSN: 2442-9880	5%	

Pengecekan di atas menggunakan alat IThenticate dengan meniadakan (exclude) beberapa hal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang kurang dari 2 persen.
2. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang disitasi oleh pihak lain.
3. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang terindikai plagiasi kepada karya ilmiah yang bersangkutan.
4. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang menunjukan url atau laman karya ilmiah yang bersangkutan.
5. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang diupload dalam bentuk yang berbeda (online pribadi) yang terdeteksi merupakan karya sendiri bukan merupakan laman publikasi Jurnal resmi hanya untuk kepentingan sharing (seperti https://www.researchgate.net facebook.com dll) sehingga bukan termasuk auto-plagisasi/self plagiarism.

Berdasarkan hasil pengecekan di atas, maka karya ilmiah tersebut diatas dapat diteruskan usulannya ke kopertis Wilayah V.

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Rektor	Wakil Rektor I
Nandang Sutrisno, S.H., LLM., M.Hum., Ph.D.	Dr.-Ing. Ir. Ilya Fadjar Maharika, MA., IAI.